



**Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Republik Indonesia**

Investasi Sebagai Katalisator Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

**Ferry Akbar Pasaribu
Asisten Deputi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi**

18 Oktober 2024





Why We Need Investment?

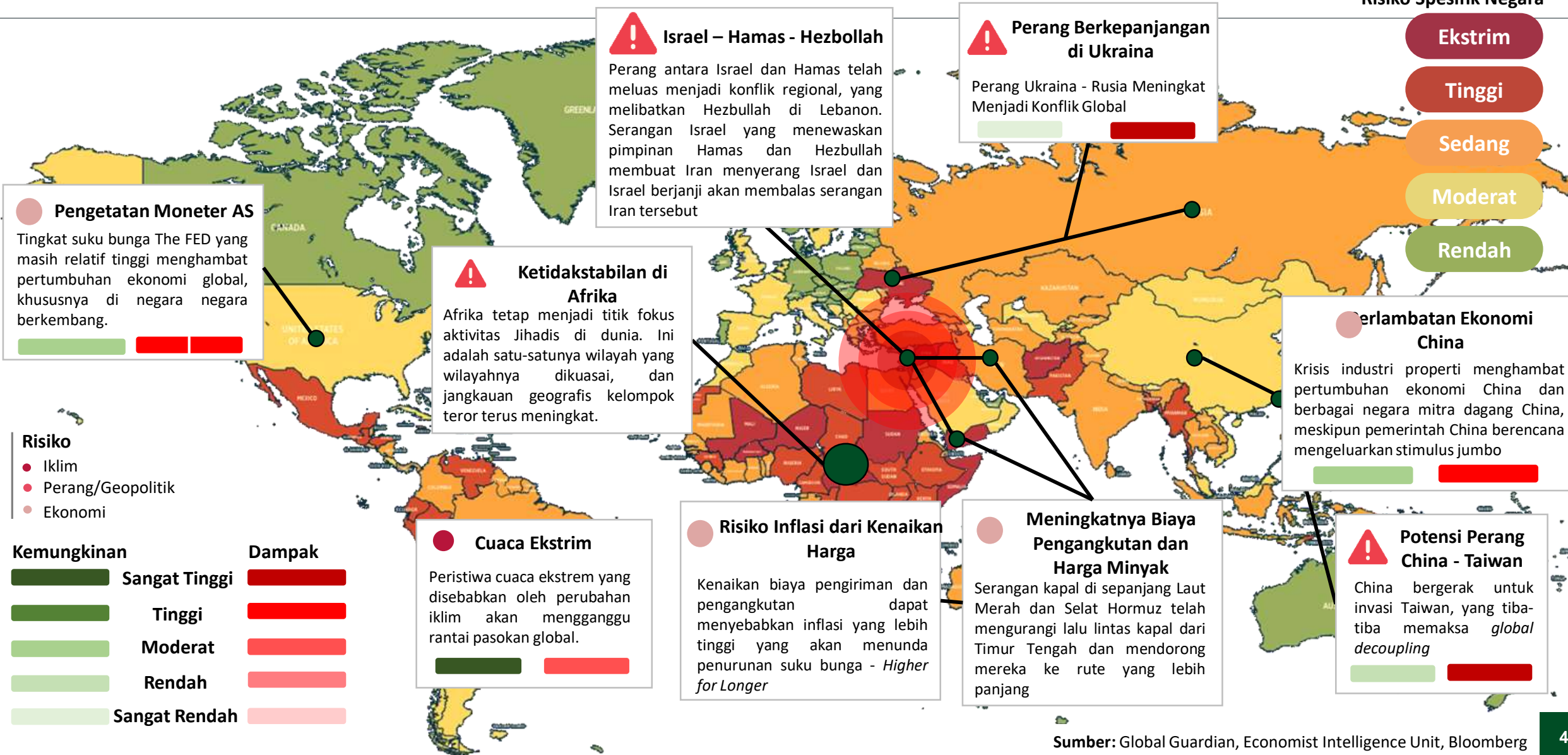
- Ekonom senior Indonesia Chatib Basri menyatakan (per Desember 2023) untuk dapat tumbuh 6 – 7 persen Indonesia harus menciptakan rasio investasi terhadap PDB sebesar 41 – 47 persen. Jika diterjemahkan ke dalam PDB harga berlaku, maka nilainya mencapai Rp 19.500 triliun hingga tahun 2045.
- Tahun 2023 target investasi adalah Rp 1.400T dan 2024 targetnya Rp 1.650T

Pertumbuhan Ekonomi Menghadapi Tantangan Regional dan Global



Risiko Spesifik Negara

- Ekstrim
- Tinggi
- Sedang
- Moderat
- Rendah



Risiko

- Iklim
- Perang/Geopolitik
- Ekonomi

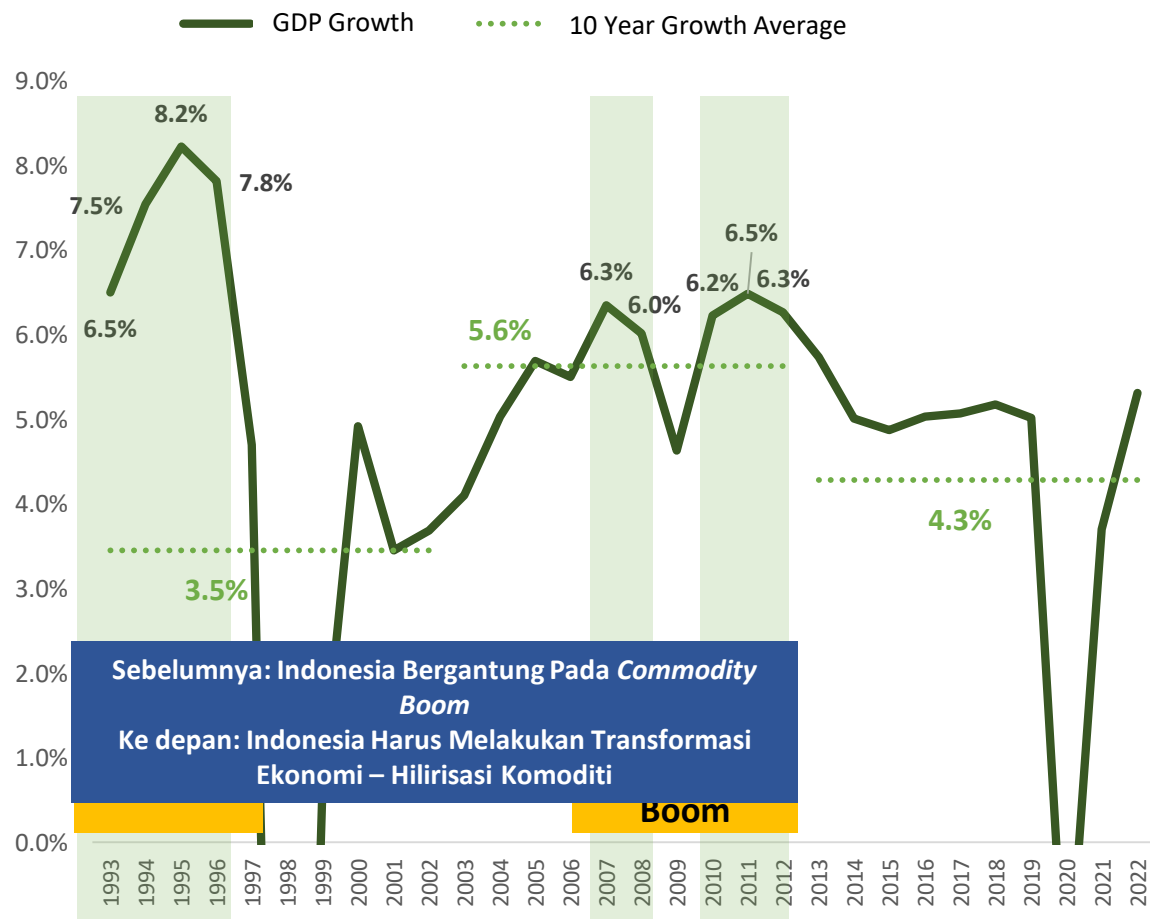
Kemungkinan	Dampak
Sangat Tinggi	Ekstrim
Tinggi	Tinggi
Moderat	Sedang
Rendah	Moderat
Sangat Rendah	Rendah

Cita - Cita Besar Indonesia Untuk Menjadi *High-Income Country* Pada Tahun 2045

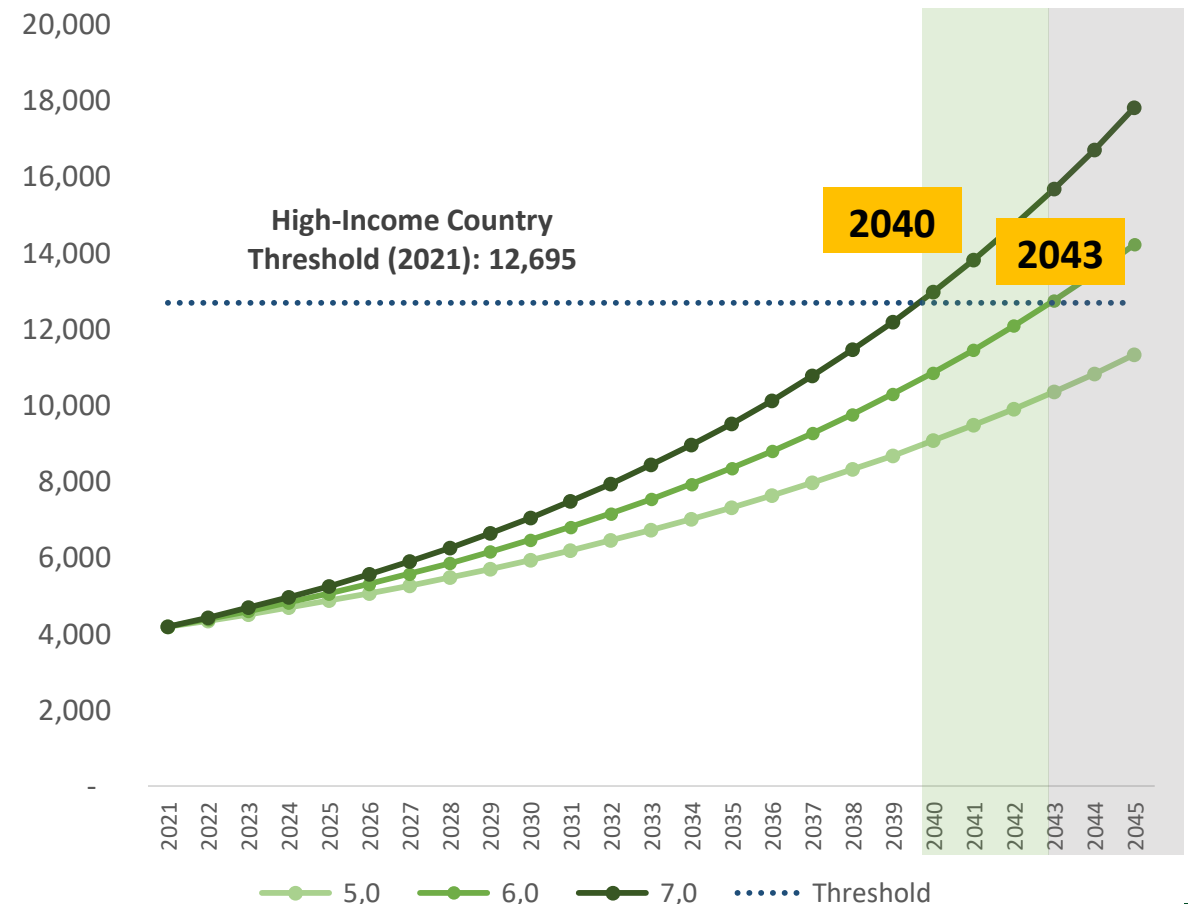


Untuk Mencapainya, Indonesia Harus Tumbuh Di Atas 5 Persen

**Pertumbuhan Ekonomi 30 Tahun Terakhir
(persen, 1993 - 2022)**



**GNI Per Capita Simulation
(USD Constant 2021, Atlas Method)**



Indonesia Berpotensi Mewujudkan Visi: Indonesia Merupakan Negara Kepulauan Terbesar di Dunia dengan Kekayaan Sumber Daya Alam yang Berlimpah



Tak hanya sumber daya alam, bentang alam yang luas, jumlah penduduk yang banyak, dan letaknya yang strategis juga menjadi sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi kita.



17,500 islands
with +108,000 km of
coastline



Population of 281.6
million people



It is located along a major sea route connecting East Asia, South Asia and Oceania



World's Largest
Nickel Reserves



World's 2nd Biggest
Tin Reserves



6th Biggest Bauxite
Reserves



7th Biggest Copper
Reserves



3,686 GW of
Potential RE



12 Million Tons Per
Year Sustainable
Fisheries Production
Potential



45% of goods trade in
the world is shipped via
the Indonesian sea



>50 Million
Tons/Year Potential
for Sea Aquaculture
Production

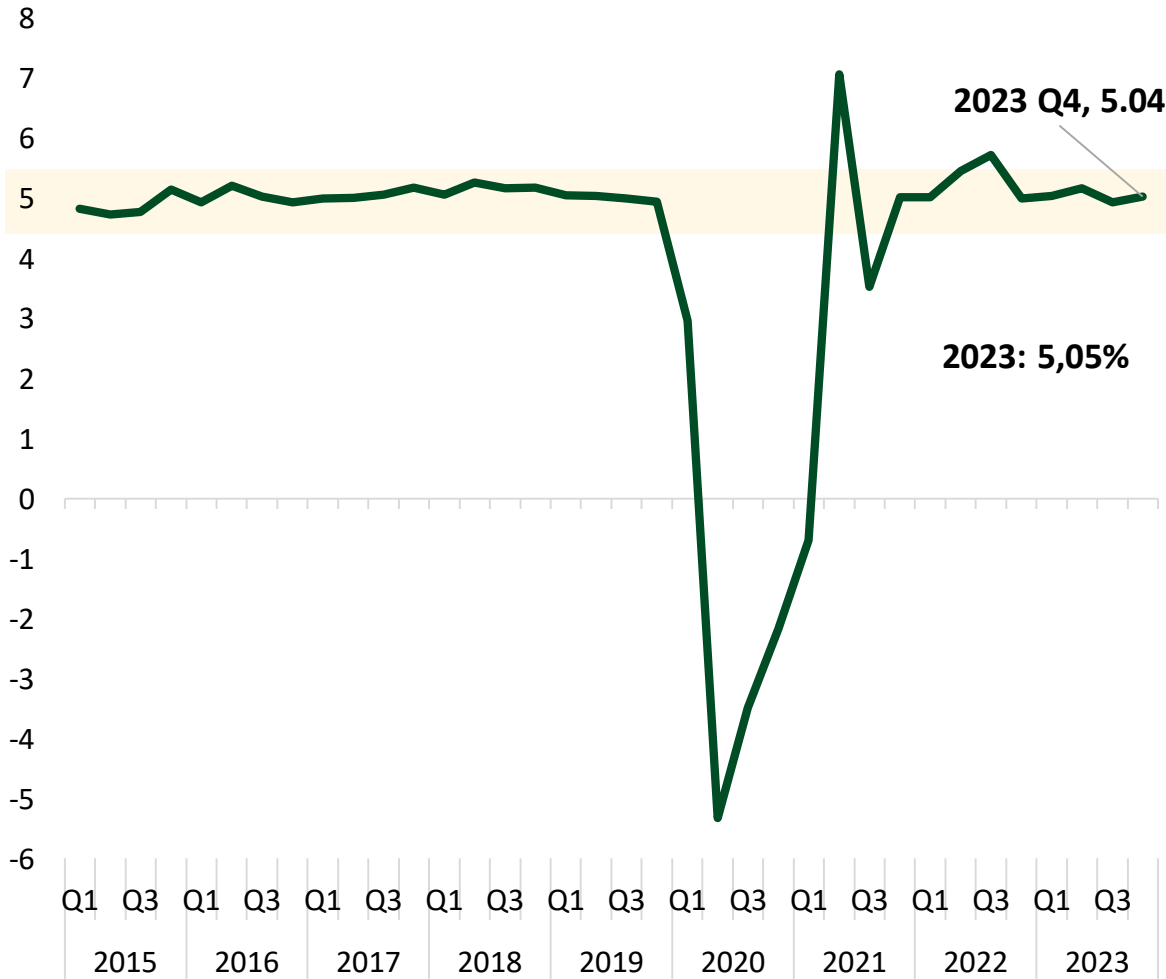


115,000 km of Sea Cables
Support National/Global
Digitalization Flows

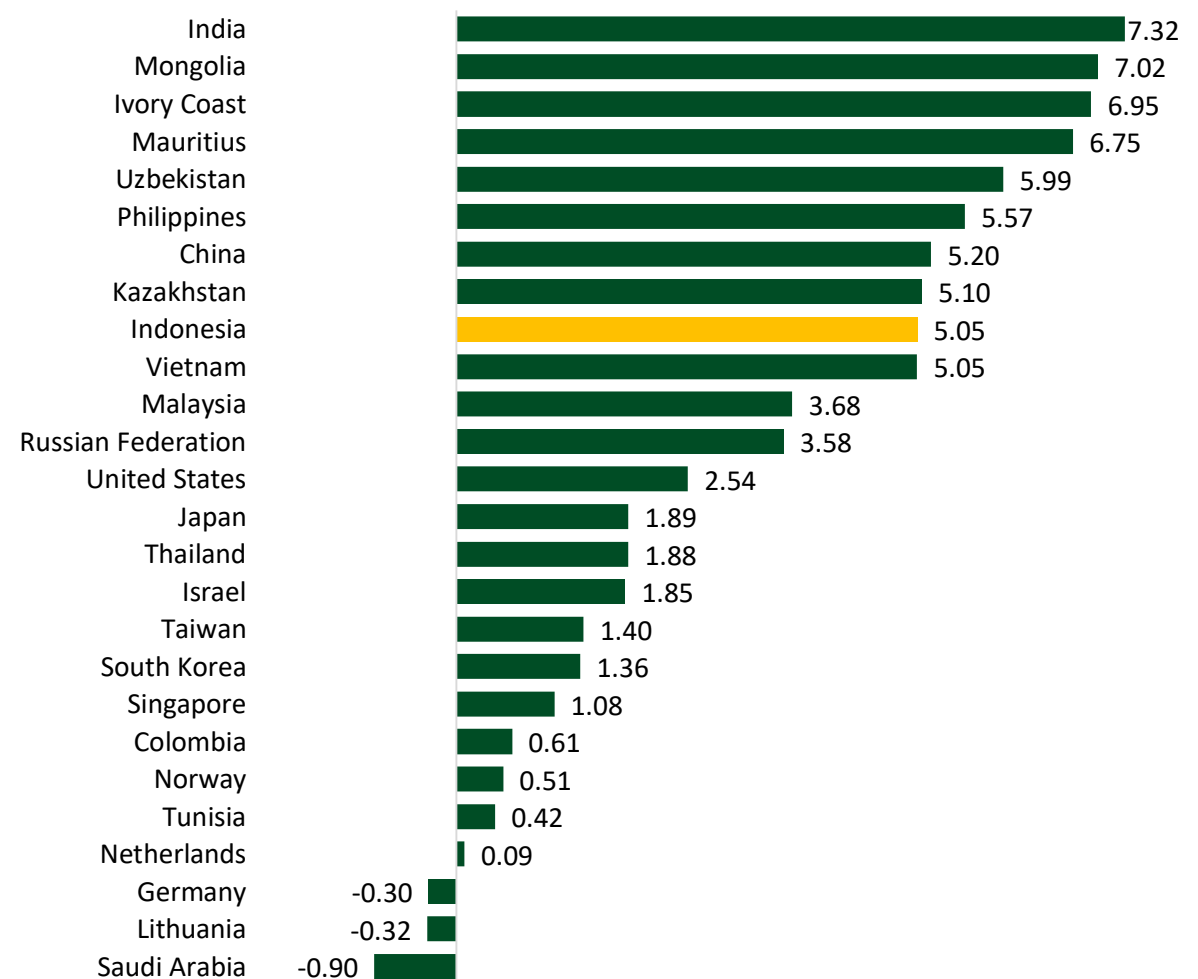
Selama 10 Tahun Terakhir Ekonomi Indonesia Tumbuh di Kisaran 5%



Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
(persen, yoy)



Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara Tahun 2024
(persen, yoy)



Indikator Makroekonomi Indonesia Termasuk yang Terbaik di Negara G20 dan ASEAN



Pertumbuhan ekonomi kuat

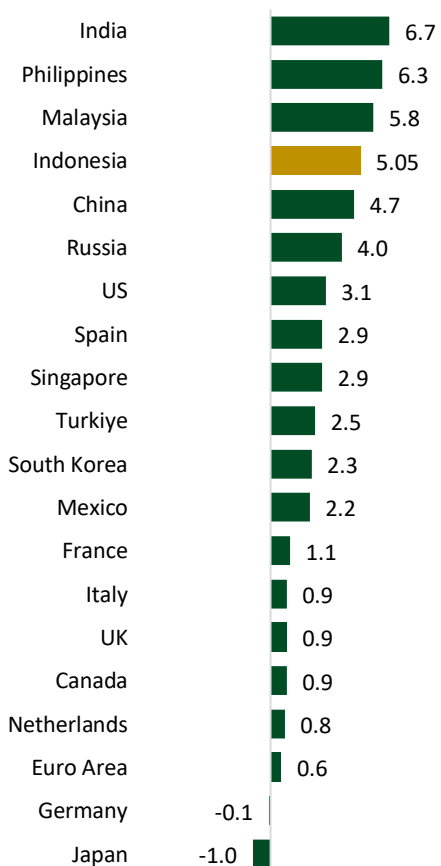
Tingkat inflasi rendah

Utang pemerintah rendah

Kinerja portofolio positif

Nilai Tukar relatif stabil

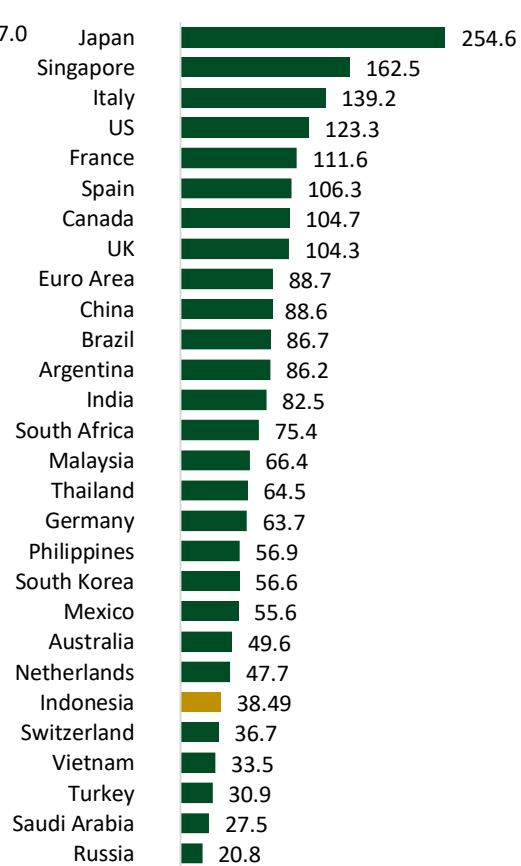
GDP Growth % 2Q24 – G20 Countries & ASEAN



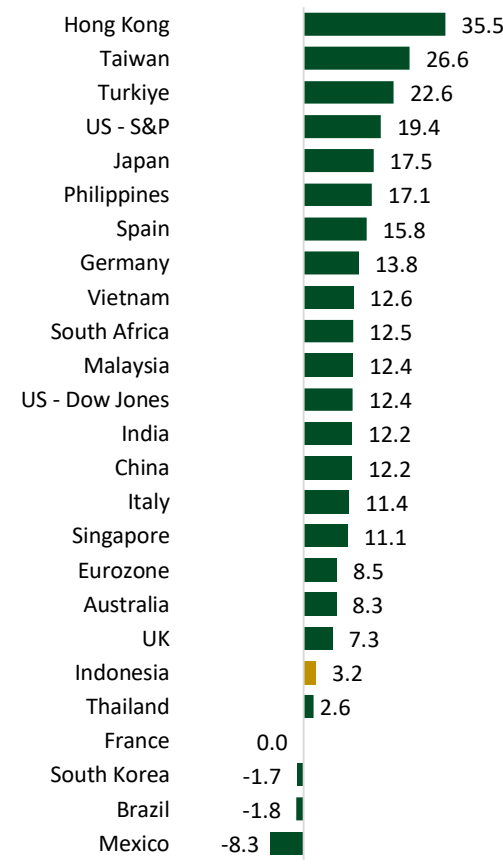
Inflation % - G20 Countries & ASEAN



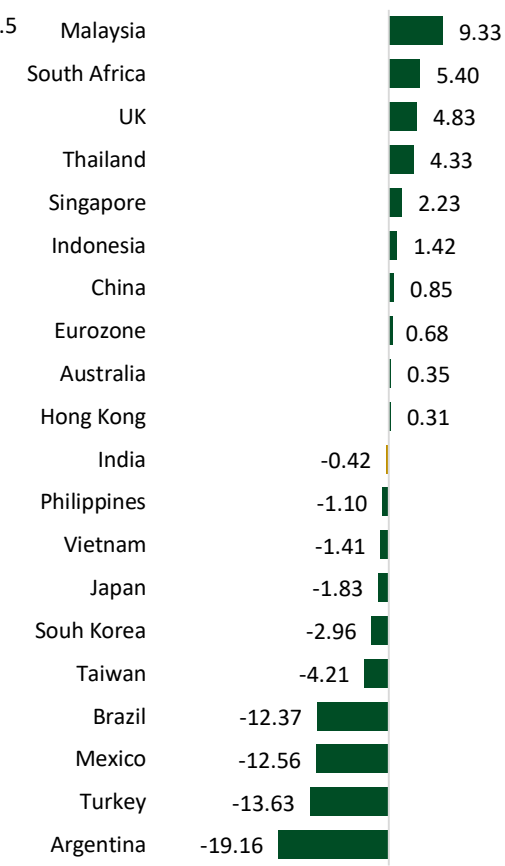
Government Debt Ratio to GDP % – G20 Countries & ASEAN



YTD Stock Performance - G20 Countries & ASEAN



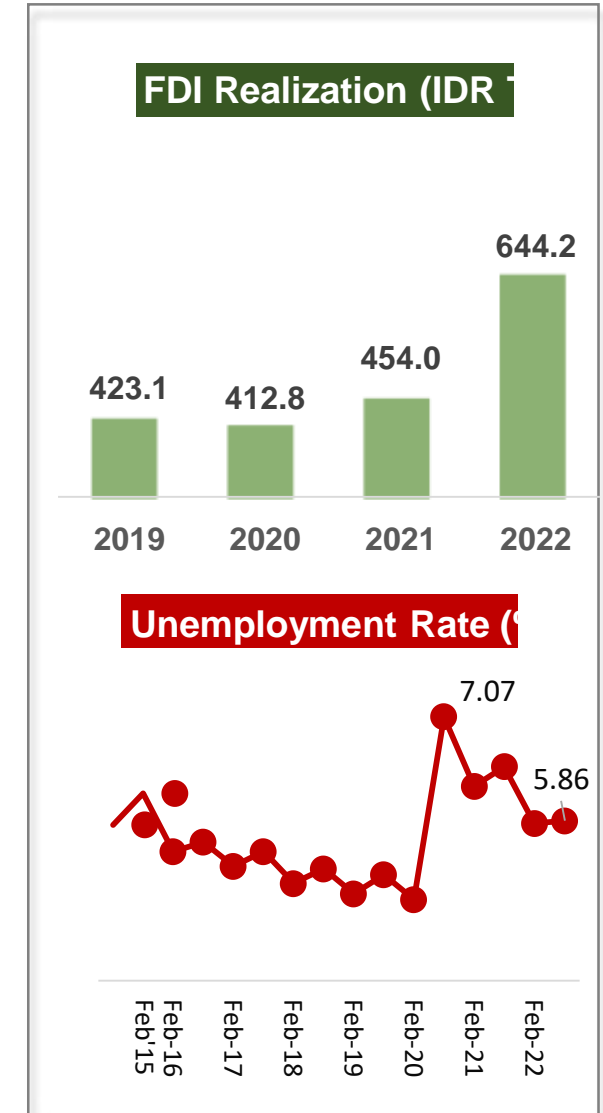
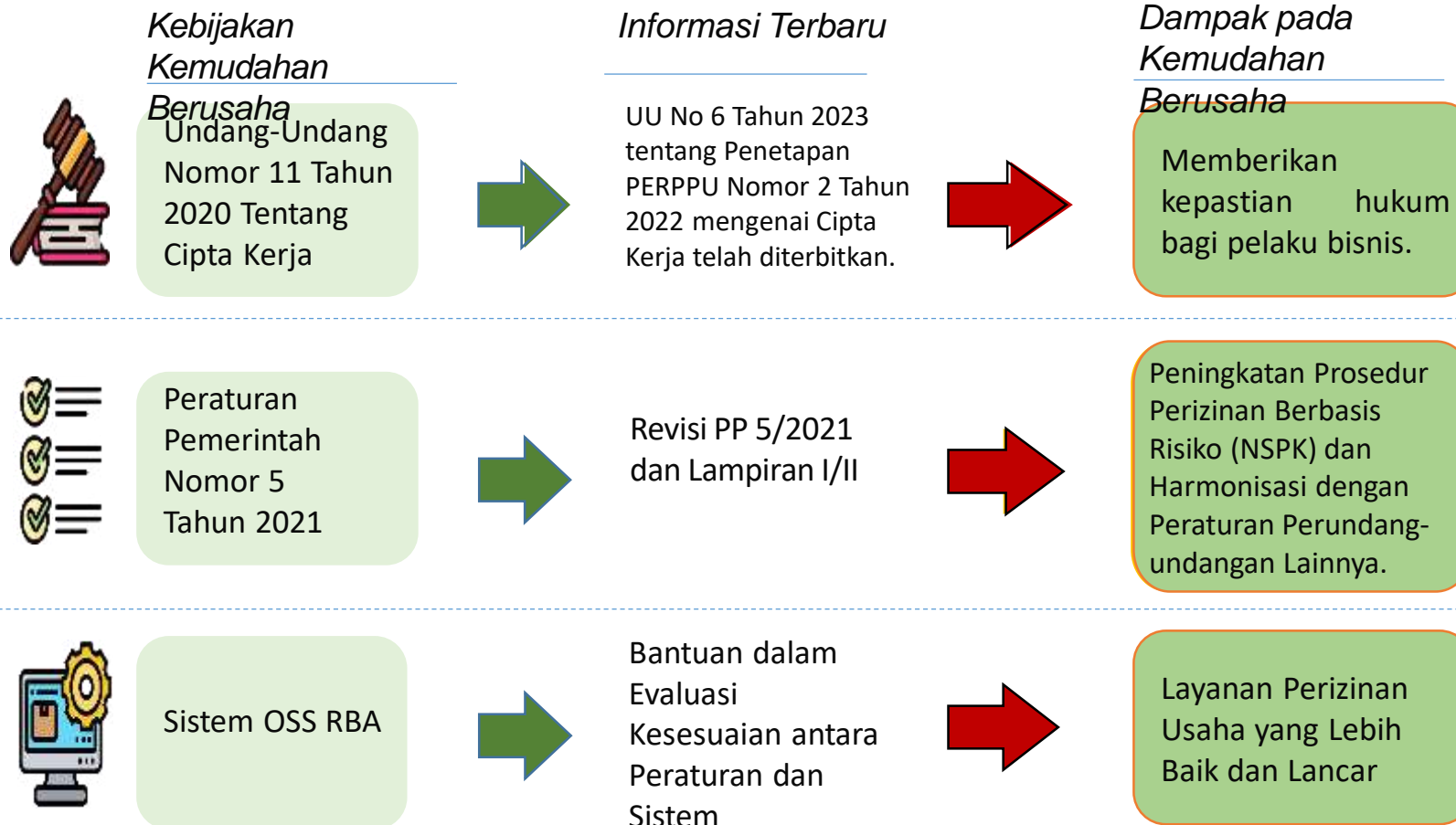
YTD Exchange Rate Against USD – G20 Countries & ASEAN



Upaya Deregulasi Untuk Memudahkan Pengembangan Bisnis

Peningkatan regulasi dalam konteks reformasi struktural terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku bisnis.

Pemangkasan Prosedur Administratif dan Menciptakan Iklim Investasi yang Positif



Online Submission System (OSS) Untuk Mempermudah Proses Perizinan Investasi



- Pelaku Usaha mendaftarkan diri dengan membuat akun dalam laman OSS
- Pelaku Usaha mengajukan izin berusaha menurut bentuk usaha dan risikonya
- OSS memberitahu Pelaku Usaha, persyaratan dasar dan persyaratan perizinan sektoral apa saja yang dibutuhkan

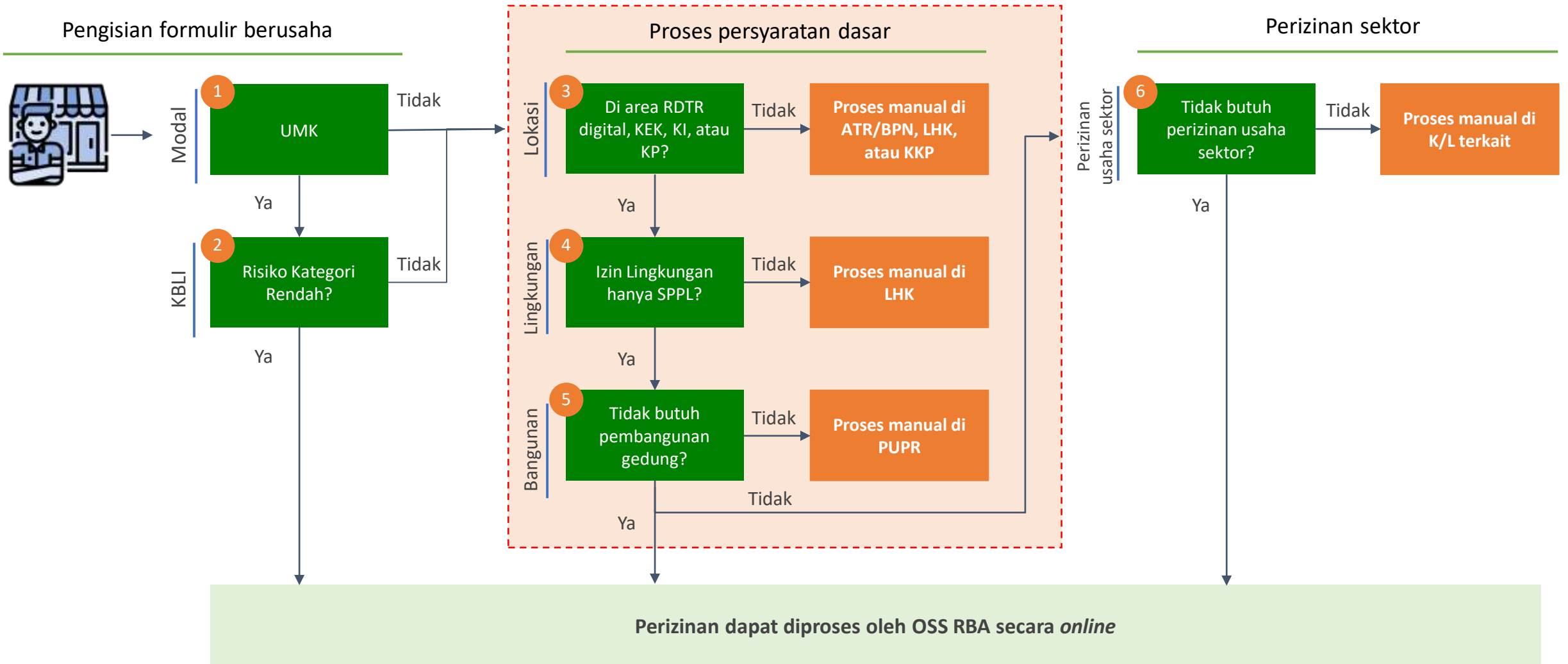
- Pelaku Usaha non-UMK yang membutuhkan Penilaian Lingkungan (UKL/UPL terverifikasi dan AMDAL) maupun membutuhkan gedung baru, harus melewati proses pemenuhan persyaratan dasar ini:
 1. **Izin KKPR**
 2. Izin Lingkungan
 3. Izin bangunan¹

- Pelaku Usaha tertentu harus memenuhi PB-UMKU, apabila bidang usaha dalam KBLI yang dipilihnya memberikan persyaratan tambahan yang harus dipenuhi melalui PB-UMKU

Hambatan yang paling mendesak untuk disempurnakan adalah proses persyaratan dasar, karena proses permohonan perizinan yang pertama dilalui oleh pelaku usaha

1. Jika Pelaku Usaha membutuhkan perizinan tersebut

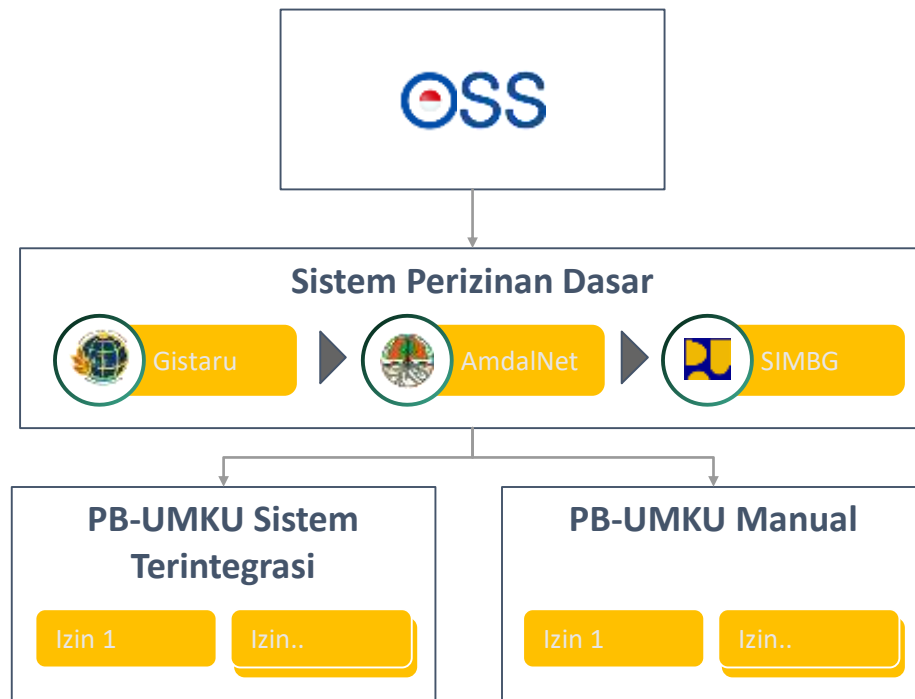
Hambatan Yang Paling Mendesak Dalam Implementasi OSS-RBA Berada di Proses Persyaratan Dasar



 Bottleneck

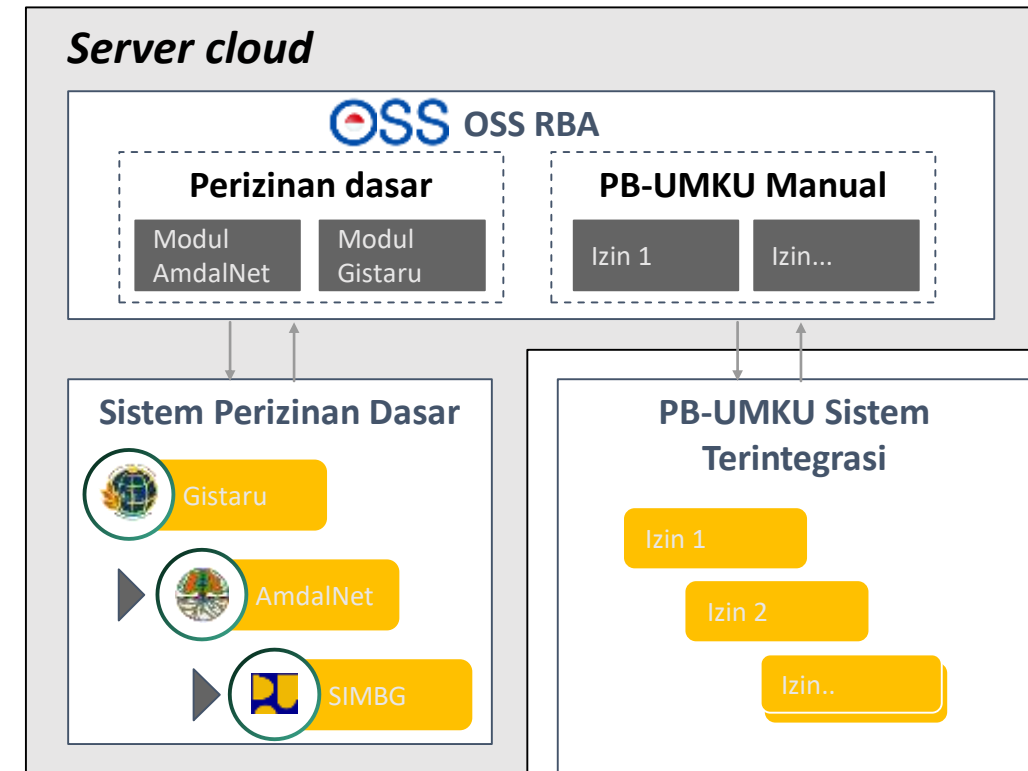
Pengembangan Ekosistem Perizinan Secara Terpadu dan Terintegrasi Diperlukan untuk Mengatasi Isu OSS Saat Ini

Ekosistem OSS saat ini



- Setiap sistem menggunakan server fisik terpisah
- Pengembangan sistem masing-masing K/L tidak terstandar

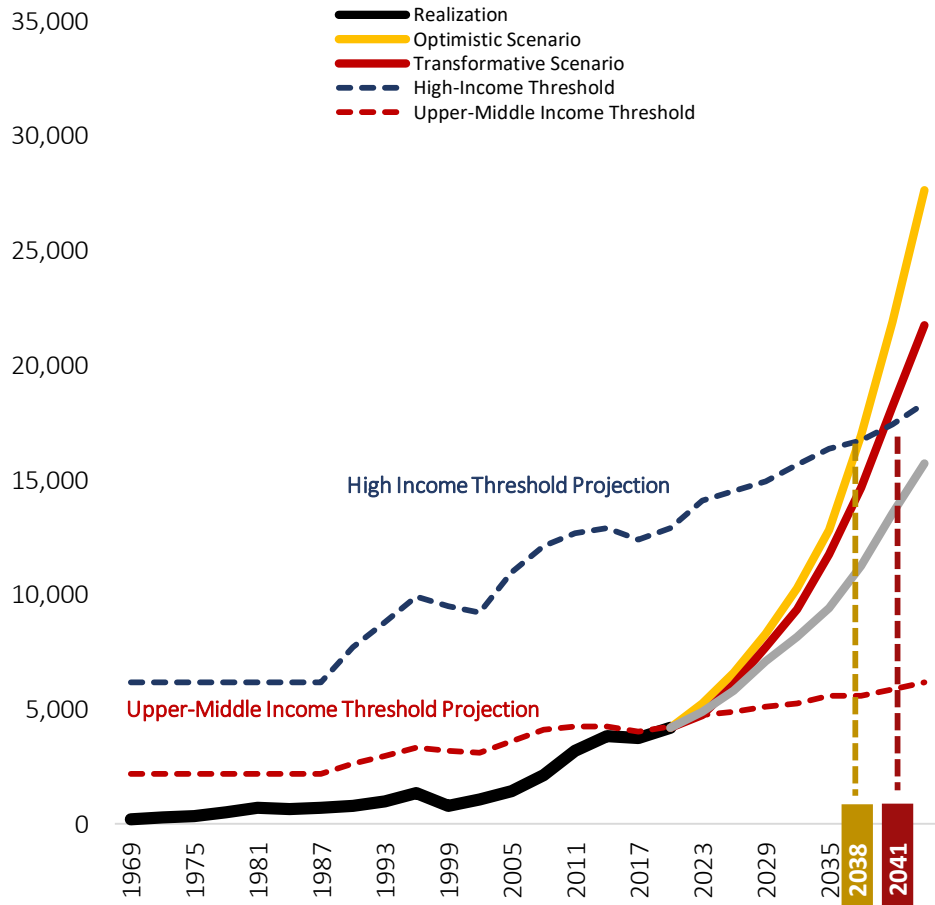
Ekosistem OSS tujuan – usulan



- Ekosistem berada pada satu server *cloud* terintegrasi
- Pengembangan terpadu dengan beberapa fungsi dikembangkan di dalam OSS

Program Hilirisasi Merupakan *Driving Force* Untuk Transformasi dan Percepatan Pertumbuhan Perekonomian

Indonesia's GNI Per Capita Projection (USD)



Sources: Bappenas, Mol

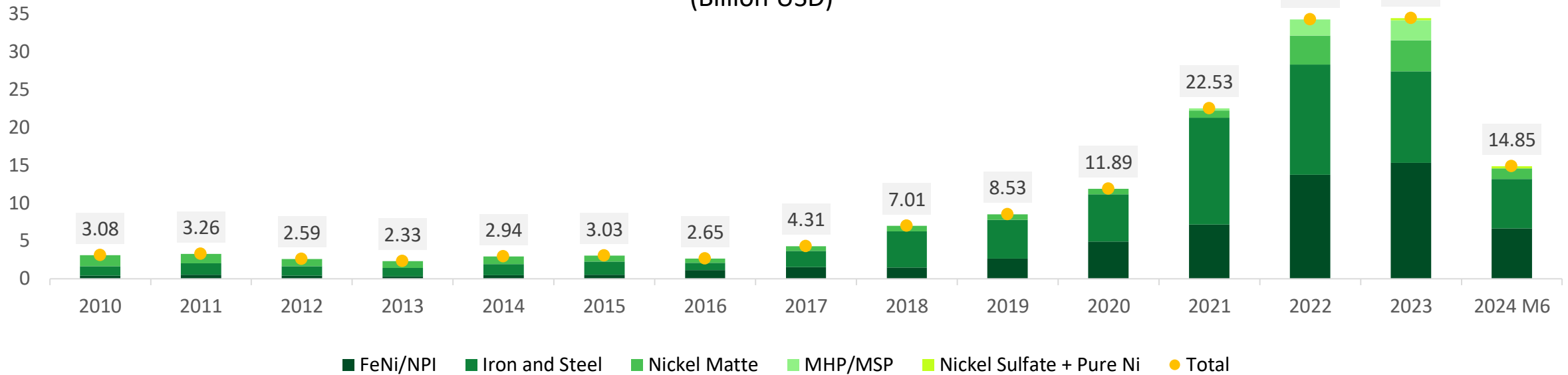
Downstream Impact Projection for Selected Commodities (2040)

	Target Industry	GDP (USD Mn)	Exports (USD Mn)	Labor (people)
Nickel	Superalloy Steel EV Battery Pack	43.200	81.000	357.000
Bauxite	Solar PV EV Components	36.996	53.346	766.807
Copper	Cable Electro Motor	34.870	281.890	253.583
Tin	PVC PCB	23.510	73.070	57.299
Seaweed	Carrageenan Biostimulants	935	1.716	9.264

Nikel Merupakan *Spearhead* Dalam Program Hilirisasi

Program Hilirisasi Mendorong Peningkatan Ekspor Besi dan Baja serta Material Baterai Lithium

Export of Nickel Downstream Products (Billion USD)



Nickel Ore

Nickel and Cobalt Sulphate

Battery Precursor

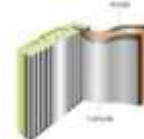
Cathode

Battery Cell and Pack

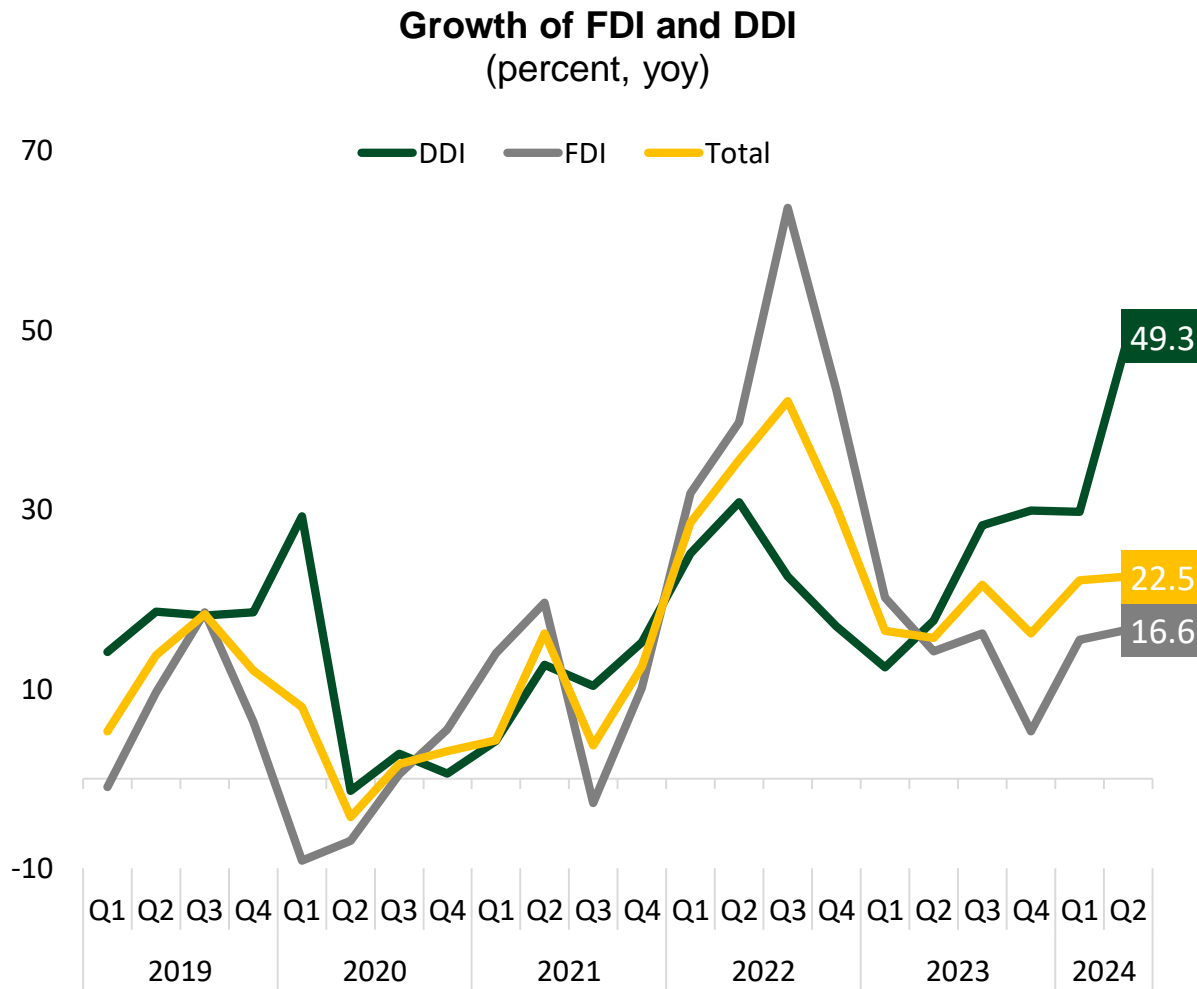
ESS

Charging Station

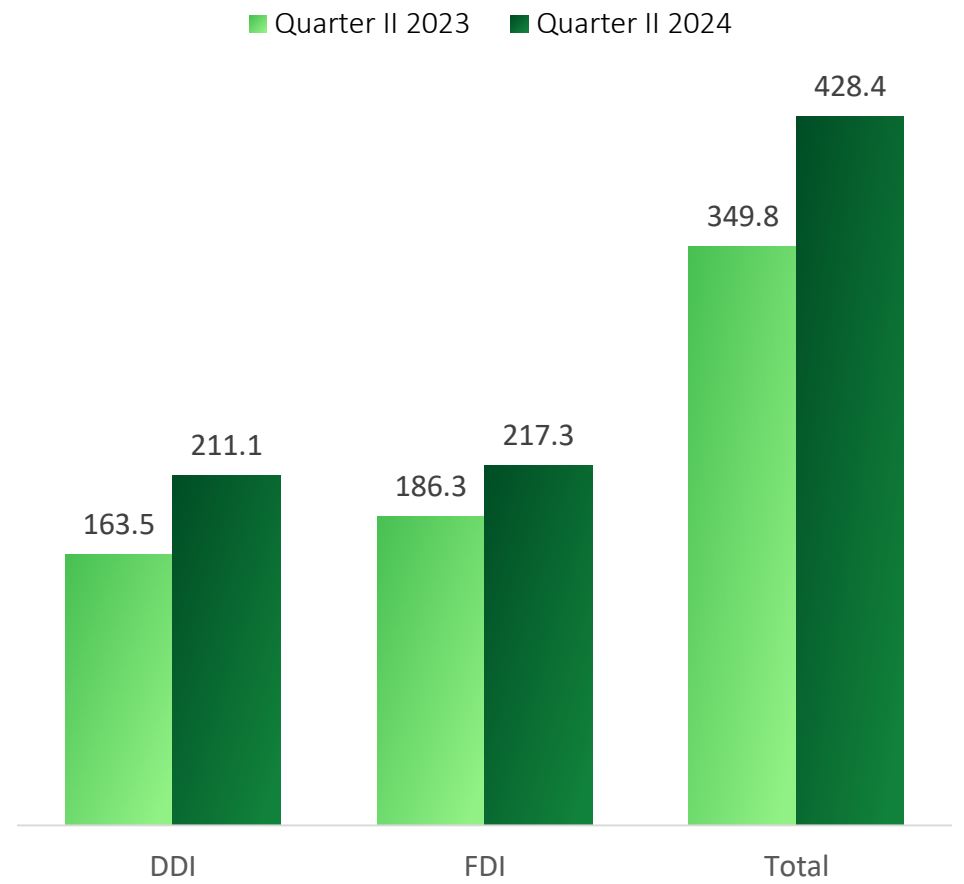
Battery Recycle



Pertumbuhan Investasi Meningkat , PMA dan PMDN Tumbuh Lebih Cepat di Triwulan II 2024



Realisasi Investasi Triwulan II Tahun 2024 (Rp Triliun)



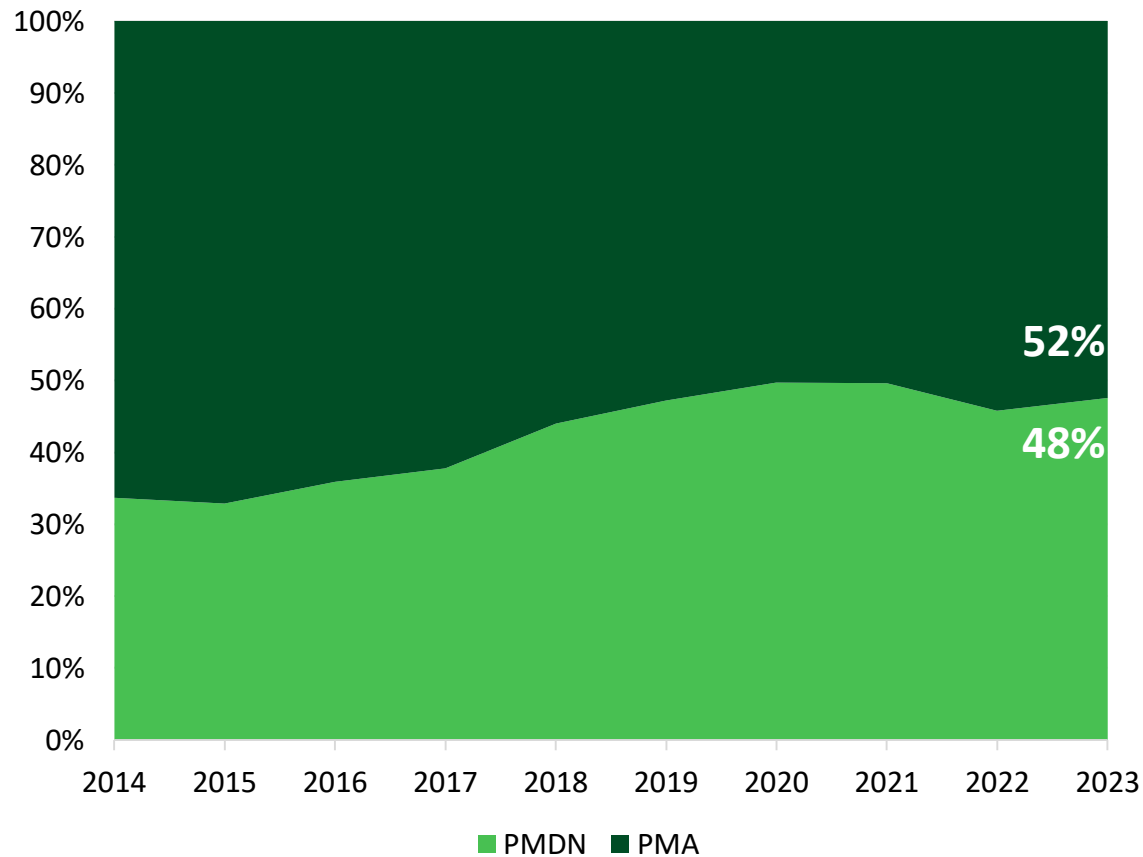
Realisasi Investasi Utamanya Didukung oleh PMA yang Terus Mengalami Peningkatan Khususnya di Luar Jawa



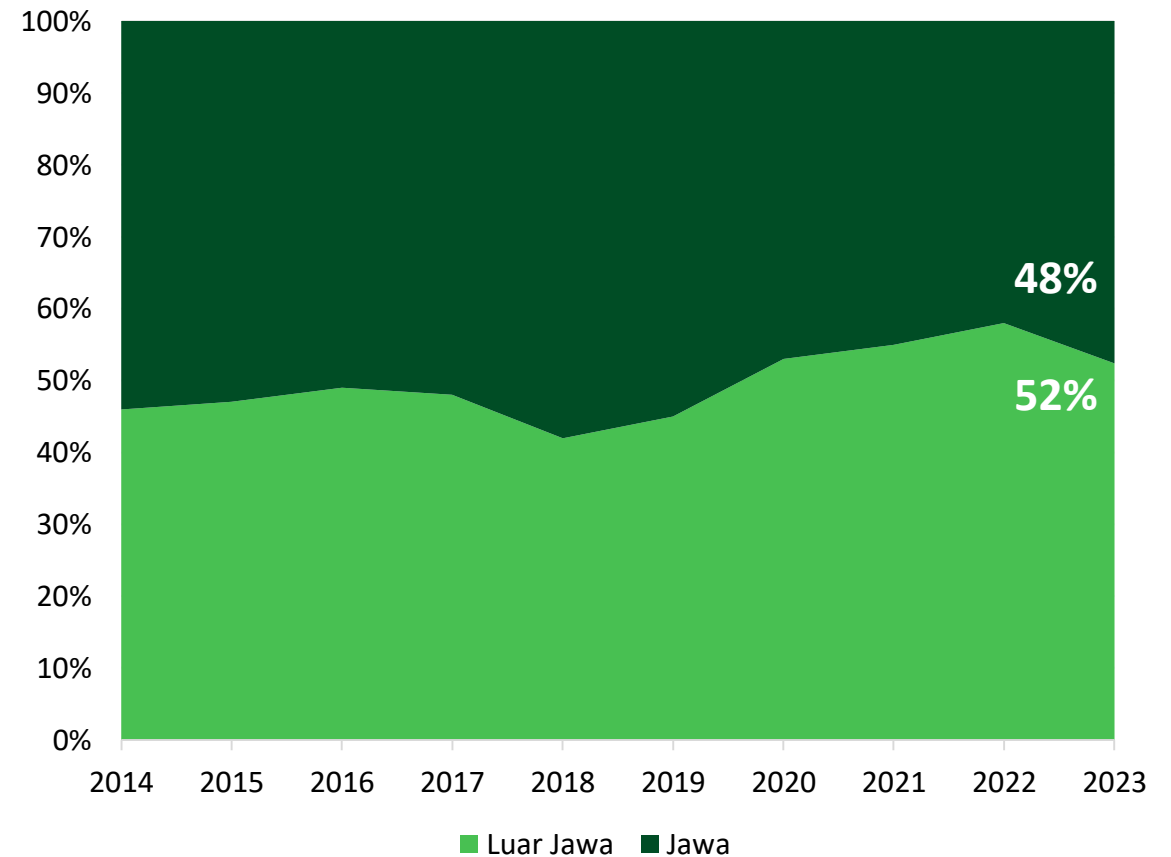
Proporsi PMDN dalam Total Realisasi Investasi Memiliki Tren Meningkat dan Hampir Menyamai PMA

Realisasi PMA di Luar Jawa Terus Meningkat

Share Realisasi PMA vs PMDN
(Persen)



Share Realisasi PMA di Jawa vs Luar Jawa
(Persen)



Semua Wilayah Mengalami Akselerasi, Namun Pulau Jawa Masih Mendominasi

Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Pulau Pada Tahun 2023
(persen, yoy)



- Meskipun terjadi perlambatan ekonomi global, ekonomi Indonesia tetap tumbuh dengan solid serta inklusif.
- Peningkatan mobilitas serta terjaganya daya beli masyarakat pada tahun 2023, mendorong penguatan pertumbuhan Indonesia terjadi di semua Pulau.
- Kelompok provinsi di Pulau Jawa masih mendominasi struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada Tahun 2023 dengan kontribusi sebesar 56,48 persen.
- Pertumbuhan tertinggi (yoy) tercatat di kelompok Pulau Maluku dan Papua yang tumbuh sebesar 8,65 persen; diikuti Pulau Sulawesi sebesar 7,05 persen; Pulau Jawa sebesar 5,31 persen; Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 5,08; serta Pulau Kalimantan sebesar 4,94 persen.
- Selanjutnya, kelompok provinsi di Sumatera tumbuh paling rendah yaitu sebesar 4,69 persen, namun tetap lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Sumatera tahun lalu yang sebesar 3,18 Persen.



Peran Pemerintah Daerah ...

Perizinan KKPR Merupakan Kunci Awal Persyaratan Dasar Untuk Mendapatkan NIB Melalui OSS - RBA



BERANDA | INFORMASI ▾ | REGULASI | PANDUAN | KONTAK ▾ | Pencarian...

RDTR Interaktif KEMBALI KE RTR

RDTR Interaktif

Layer Pengaturan Alat

Pilih Provinsi
Jawa Barat ▾

Pilih Kabupaten/Kota
Kota Depok ▾

Pilih RDTR
RDTR Kota Depok ▾

Terapkan Layer

Saring berdasarkan Kegiatan
Semua ▾

106.854109, -6.408653

Detail Administrasi

Provinsi
Jawa Barat

Kecamatan
Kec. Cilodong

Kelurahan
Kel. Sukamaju

Nama Jalan
Jalan Tole Iskandar

Kode Pos
16475

Zonasi: Daftar Kegiatan Intensitas Ruang Tata Bangunan

Kode Zona
K

Nama Zona
Perdagangan dan Jasa

Kode Sub Zona
K-2

Nama Sub Zona

Dengan terimplementasinya RDTR Digital proses untuk mendapatkan izin KKPR akan semakin mudah bagi para pelaku usaha/investor



- Pada saat ini terdapat **259 RDTR** digital yang sudah tertanam di OSS (per 1 Oktober 2024)
- **522 RDTR** yang telah ditetapkan PERDA
- ATR/BPN dan BKPM telah memetakan **500 kab/Kota** yang akan dijadikan **prioritas dalam pembuatan RDTR**



Kendala Penyusunan RDTR

Sumber Daya Manusia

Kurangnya SDM baik dari kuantitas maupun kompetensi

Skala Peta

- Ketersediaan peta dasar
- Perbedaan Skala Peta untuk RDTR, BIG 1:5.000; Kemendagri 1:50.000
- Ketidaksinkronan batas daerah, garis pantai, dan batas kawasan hutan

Batas Daerah

Anggaran

- Peruntukan anggaran untuk penyusunan RDTR dari DAU dan DAK



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Kendala Penyusunan RDTR

Tumpang Tindih Administrasi Pertanahan

LSD/KP2B/LP2B

- Perlunya konsolidasi data administrasi pertanahan dalam penyusunan RDTR untuk pemenuhan kepastian hukum
- Ketidaksinkronan pemetaan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri ATR/BPN No.1589/SKHK.02.01/XII/2021 dengan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)/ Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian (Kementan)

KLHS

Belum adanya data base terpusat yang dapat diakses oleh seluruh sistem informasi yang dimiliki oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah/OPD yang terlibat dalam penyusunan RDTR

OSS RBA

Integrasi dengan OSS RBA



KEMENTERIAN
PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN
KESKUTUBAHAN
REPUBLIK INDONESIA

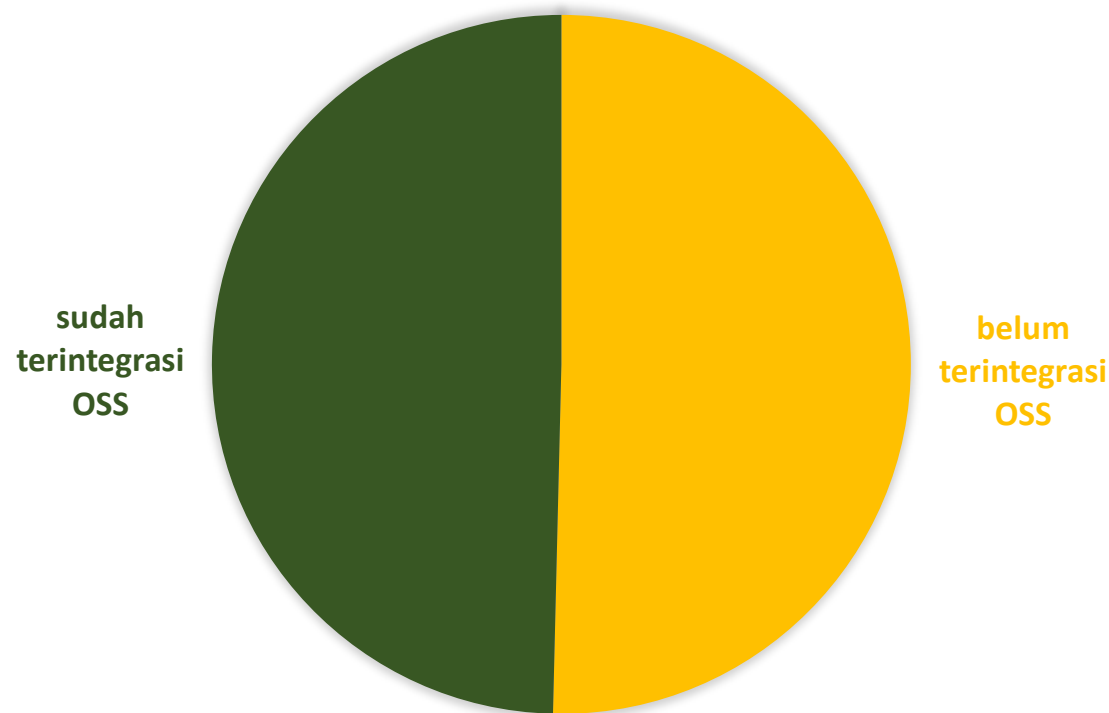
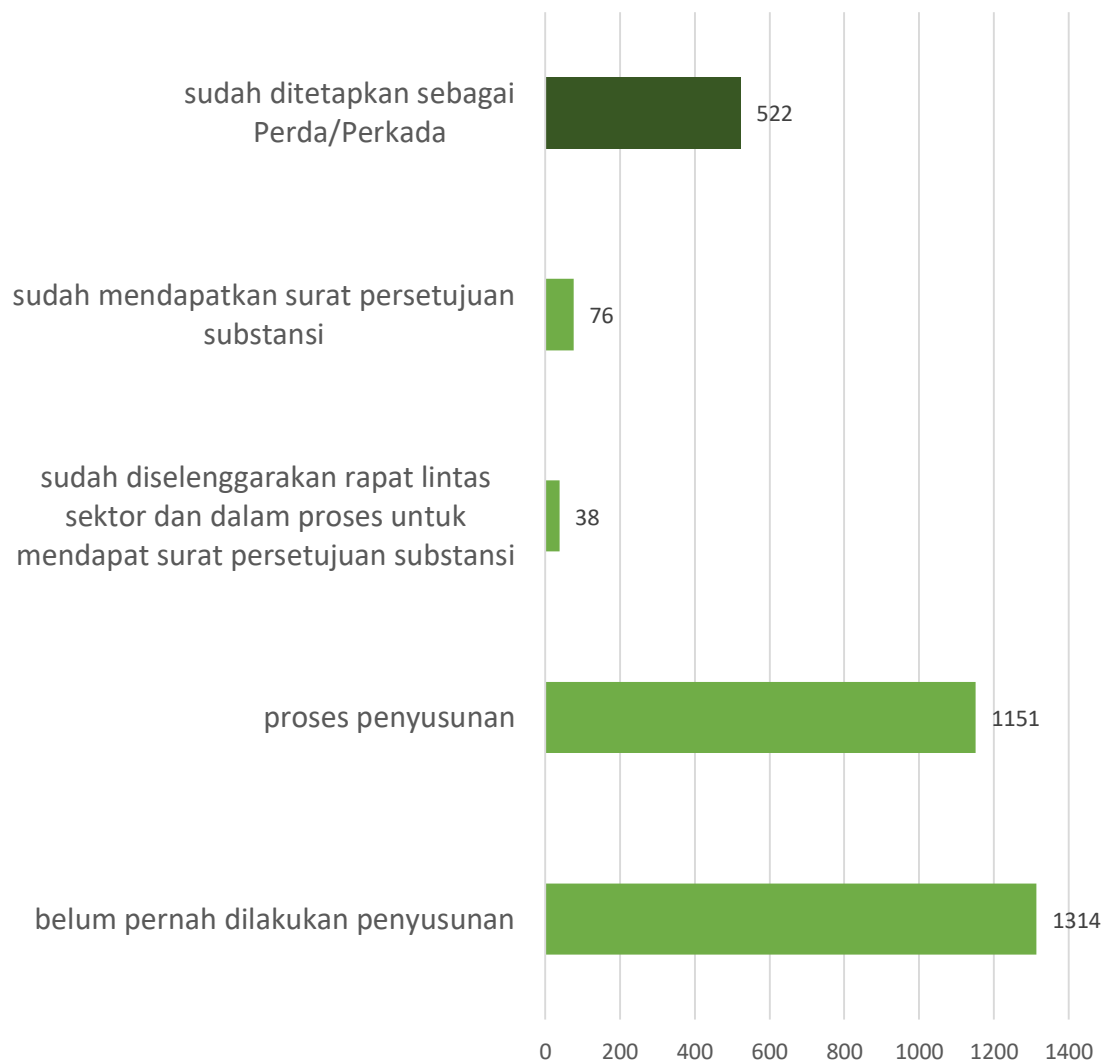


SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA



SEKRETARIAT KEMENTERIAN
PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

Perkembangan Penyusunan RDTR Secara Nasional



Dari 522 RDTR yang telah terbit, baru setengahnya atau 259 RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS RBA; 263 lainnya belum terintegrasi



Thank You